

Bukti empiris kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD eks. Karisidenan Kedu berdasarkan pada teori agency

Denty Yulis Agustina*, Wawan Sadtyo Nugroho, Yulinda Devi Pramita

Program Studi Akuntansi / Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: wawan.sn11@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of human resource competence, good governance, internal audit, successful implementation of financial information systems and application of government accounting standards on the quality of local government financial reports at BPKAD Karisidenan Kedu. The data source in this study used primary data obtained from observations and questionnaires using a purposive sampling method so that the sample obtained was 67 respondents consisting of section heads, regional financial data managers, general administration, treasurers and financial staff at BPKAD Karisidenan Kedu. The results of this study indicate that the competence of human resources and internal audit affects the quality of local government financial reports. Whereas Good Governance, the success of implementing the financial system and application of government accounting standards have no effect on the quality of local government financial reports.

Kata Kunci:

Kompetensi sumber daya manusia; good governance; audit internal; sistem informasi keuangan; kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, audit internal, kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Karisidenan Kedu. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan kuesioner dengan metode *purposive sampling* sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 67 responden yang terdiri dari kepala bagian, pengelola data keuangan daerah, administrasi umum, bendahara dan staff keuangan pada BPKAD Karisidenan Kedu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan *good governance*, kesuksesan penerapan sistem keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Kurangnya kualitas laporan keuangan sering menjadi permasalahan dalam suatu instansi termasuk pada pemerintah daerah di Indonesia. Belakangan ini, ada fenomena

ucaman selamat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Bagi yang belummemahami kriteria pemberian opini, predikat itu bisa menjadi pencitraan positif bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel bahkan bisa jadi terbebas dari korupsi.

Tuntutan akuntabilitas atas organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun di daerah tentunya tidak lepas dari tanggung jawan Organisasi Perangkat Daerah di setiap daerah agar tepat waktu dan relevan dalam melaporkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Peningkatan kualitas laporan keuangan pada suatu daerah akan memudahkan instansi khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menentukan keputusan informasi kepada pihak yang berkepentingan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Irafah & Sari, 2020).

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan tahun 2022 pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi opini Tidak Wajar dan opini LKPD di Indonesia mengalami perbaikan. Kenaikan opini WTP menunjukkan adanya kualitas LKPD. Contohnya pada wilayah Karisidenan Kedu, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa wilayah Kedu yang meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen merupakan wilayah di Jawa Tengah yang mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017-2021 dari BPK (Saragi, 2018). Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Daerah Kedu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Opini LKPD Karisidenan Kedu

Wilayah Kedu	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Wonosobo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Magelang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Kebumen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2021 (<https://jateng.bpk.go.id>)

Meskipun pada enam pemerintah daerah di wilayah kedu tersebut sudah memperoleh opini WTP, namun BPK masih menemukan beberapa catatan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK kemudian memberikan rekomendasi untuk berbagai permasalahan atau catatan yang diterima oleh setiap daerah. Sesuai pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah hasil laporan pemeriksaan diterima.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori agensi untuk meminimalisir adanya informasi yang tidak simetris serta kondisi ketidakpastian. Menurut Jensen dan Mecling, (1976) teori agensi merupakan teori terkait dengan asimetri informasi atau kontrak antara satu atau sebagian orang (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang dalam hal pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah Yudha *et al.*, (2019).

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Irafah & Sari, (2020) dan Utomo *et al.*, (2021) mengenai pengaruh sumber daya manusia, peran audit internal, kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah, pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian yaitu **pertama**, menggunakan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. **Kedua**, menggunakan seluruh variabel independen yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, audit internal, kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Irafah & Sari, (2020) dan Utomo *et al.*, (2021) terletak pada variabel penelitian, objek penelitian dan periode penelitian.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan orang-orang yang berkompeten. Salah satu bentuk kompeten SDM dapat dilihat dari waktu penyampaian LKPD ke BPK-RI (Irafah & Sari, 2020). Menurut penelitian Yudha *et al.*, (2019), Utomo *et al.*, (2021), Irafah & Sari, (2020) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Shinta *et al.*, (2020) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Sukrisno (2011) *Good Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan, atas penentuan pemerintahan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Berdasarkan penelitian Shinta *et al.*, (2020) dan Utomo *et al.*, (2021) *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Sari, (2016) *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Audit internal merupakan salah satu bagian yang sangat berpengaruh dalam penerapan sistem. Hasil audit yang berkualitas menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (Irafah & Sari,

2020). Berdasarkan penelitian Irafah & Sari, (2020) dan Tomaso *et al.*, (2022) Audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian Atika *et al.*, (2019) audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan sistem informasi keuangan daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Sari *et al.*, 2014). Berdasarkan penelitian Sari *et al.*, (2014) terdapat pengaruh positif antara sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian Irafah & Sari, (2020) sistem informasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (Amani, 2018). Menurut penelitian Shinta *et al.*, (2020) dan Utomo *et al.*, (2021) penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Sari *et al.*, (2016) penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan judul serta uraian diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: Apakah kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, audit internal, kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, audit internal, kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang menganalisis adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Populasi dan Sampel

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner yang dibagikan kepada instansi pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini WTP secara berturut-turut dalam lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2017-2021 di wilayah Karisidenan Kedu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Shinta <i>et al.</i> , 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang peraturan pemerintah • interaksi dengan sistem • Kontrol terhadap sumber daya manusia • Pendidikan dan training (Yuliani & Agustini, 2016) 	Likert
<i>Good Governance</i>	<i>Good Government Governance</i> merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan secara solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demografi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik bagi tumbuhnya aktivitas politik (Yudha <i>et al.</i> , 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas • Reposibilitas • Independensi • Kesetaraan dan kewajaran (Sukrisno, 2011) 	Likert
Internal Audit	Internal audit adalah kegiatan yang independen dan objektif beserta konsultasi yang disusun untuk meningkatkan nilai dan operasional organisasi atau perusahaan. Internal audit dapat mendukung organisasi atau perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan cara pendekatan yang terstruktur dan disiplin. (Atika <i>et al.</i> , 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian keandalan • Informasi keuangan • penilaian ketaatan • Penilaian Kinerja • Penilaian efisiensi dan efektivitas program dan tingkat objektivitas (Yuliani & Agustini, 2010) 	Linkert
Penerapan Sistem Informasi Keuangan	Sistem informasi keuangan daerah atau (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah. (PP RI Nomor 56 Tahun 2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Proses akuntansi secara terkomputerisasi • Sistem informasi tersaji secara terstruktur • sistem informasi yang terintegrasi (Diani, 2014) 	Likert
Penerapan SAP	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian laporan keuangan • Laporan realisasi anggaran • Laporan arus kas • Catatan atas laporan keuangan (Utomo <i>et al.</i>, 2021) 	Likert
Kuatitas Laporan Keuangan	Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> • Relevan • Andal • Dapat dibandingkan • Dapat dipahami (PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) 	Likert

Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2016).

2. Analisis Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$KLK = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 GG + \beta_3 AI + \beta_4 SIK + \beta_5 SAP + e$$

Keterangan:

KLK = Kualitas Laporan Keuangan

KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia

GG = *Good Governance*

AI = Audit Internal

SIK = Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan

SAP = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

α = Nilai intersep (konstan)

β = Koefisien

e = Error (tingkat kesalahan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sampel Penelitian

Tabel 3. Sampel Penelitian dan tingkat pengembalian

Uraian	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dikirim	80	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(7)	8,75%
Kuesioner yang kembali	73	91,25%
Jumlah kuesioner tidak lengkap	(6)	7,50%
Jumlah kuesioner yang diolah	67	83,75%

Sumber: Data primer yang diolah 2023

Berdasarkan pada Tabel 3 menunjukkan jumlah sampel yang dapat diolah pada penelitian ini adalah sebanyak 67 jawaban responden dengan presentase 83,75%.

2. Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviation
KLK	67	3	5	4,13	0,385
KSDM	67	3	5	4,03	0,300
GG	67	3	5	3,78	0,487
AI	67	3	5	3,96	0,617
SIK	67	2	5	3,85	0,557
SAP	67	3	5	4,04	0,367

Dari hasil uji statistik deskriptif yang ditunjukkan pada Tabel 4, dapat diambil suatu analisis bahwa:

1. Rata-rata jawaban responden pada variabel kualitas laporan keuangan adalah 4,13 dengan nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 5,00. Sedangkan standar deviasi 0,385 yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-rata jawaban responden.
2. Rata-rata jawaban responden pada variabel kompetensi sumber daya manusia adalah 4,03 dengan nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 5,00. Sedangkan standar deviasi 0,300 yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-rata jawaban responden.
3. Rata-rata jawaban responden pada variabel *good governance* adalah 3,78 dengan nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 5,00. Sedangkan standar deviasi 0,487 yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-rata jawaban responden.
4. Rata-rata jawaban responden pada variabel audit internal adalah 3,96 dengan nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 5,00. Sedangkan standar deviasi 0,617 yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-rata jawaban responden.
5. Rata-rata jawaban responden pada variabel sistem informasi keuangan dengan nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 5,00. Sedangkan standar deviasi 0,557 yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-rata jawaban responden.
6. Rata-rata jawaban responden pada variabel standar akuntansi pemerintahan adalah 4,04 dengan nilai minimum 3,00 dan nilai maksimal 5,00. Sedangkan standar deviasi 0,367 yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-rata jawaban responden.

3. Uji Kualitas Data

3.1 Uji Validitas

Tabel 5. Pengujian Validitas

Variabel	KMO	Sig. Bartlett's Test	Keterangan
KLK	0,787	0,000	Valid
KSDM	0,725	0,000	Valid
GG	0,500	0,000	Valid
AI	0,845	0,000	Valid
SIK	0,784	0,000	Valid
SAP	0,744	0,000	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas KMO Barlett's Test menunjukkan bahwa nilai KMO lebih besar dari 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat dilanjutkan.

Tabel 6. *Cross Loading*

Butir	Variabel						Keterangan
	KLK	KSDM	GG	AI	SIK	SAP	
KLK.1	0,689						Valid
KLK.2	0,811						Valid
KLK.3	0,726						Valid
KLK.7	0,652						Valid
KSDM.1		0,780					Valid
KSDM.2		0,761					Valid
KSDM.3		0,724					Valid
KSDM.4		0,747					Valid
KSDM.5		0,671					Valid
KSDM.8		0,751					Valid
GG.1			0,950				Valid
GG.5			0,950				Valid
AI.1				0,874			Valid
AI.2				0,871			Valid
AI.3				0,852			Valid
AI.4				0,604			Valid
AI.5				0,881			Valid
AI.6				0,875			Valid
SIK.1					0,765		Valid
SIK.4					0,833		Valid
SIK.5					0,912		Valid
SIK.6					0,863		Valid
SAP.1						0,627	Valid
SAP.2						0,859	Valid
SAP.3						0,734	Valid
SAP.4						0,684	Valid
SAP.7						0,786	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari hasil uji validitas pada masing-masing variabel seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, terdapat 13 butir pertanyaan yang memiliki nilai *Cross Loading* < 0,5 sehingga instrumen tidak valid atau 32,5% tidak dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

3.2 Uji Reliabilitas

Tabel 7. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan	0,668	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,820	Reliabel
<i>Good Governance</i>	0,892	Reliabel
Audit Internal	0,907	Reliabel
Sistem Informasi Keuangan	0,865	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah	0,764	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari Tabel 7 dijelaskan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel reliabel, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,626	0,729		2,229	0,030
KSDM	0,312	0,153	0,243	2,036	0,046
GG	-0,004	0,099	-0,005	-0,043	0,966
AI	0,200	0,081	0,319	2,468	0,016
SIK	0,082	0,081	0,119	1,022	0,311
SAP	0,039	0,122	0,122	0,316	0,753

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil koefisien regresi, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLK = 1,626 + 0,312 \text{ KSDM} - 0,004 \text{ GG} + 0,200 \text{ AI} + 0,082 \text{ SIK} + 0,039 \text{ SAP} + e$$

5. Uji Hipotesis

5.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,502 ^a	0,252	0,190	0,347

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 9, didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,190. Hal ini berarti variabel kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, audit internal, kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah mampu menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 19% sedangkan 81% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini.

5.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Berdasarkan jumlah $n=67$ dan $k=5$, maka $df_1 = n-k-1$, k merupakan jumlah variabel independen. $df_2 = 61$ maka diperoleh f tabel sebesar 2,366.

Tabel 10. Hasil uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2,464	5	0,493	4,102	0,003 ^b
Residual	7,327	61	0,120		
Total	9,791	66			

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Hasil uji F pada Tabel 10 menunjukkan nilai hitung sebesar 4,102 dengan probabilitas atau tingkat signifikam 0,003 berarti probabilitas $< 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} 4,102 > F_{tabel} 2,366$. Maka model yang digunakan telah bagus (*fit*).

5.3 Uji Simultan Parameter Individual (Uji t)

Statistik uji t menggunakan $\alpha = 5\%$ (0,05), satu sisi (*one tail*). Uji t dilakukan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan jumlah $n = 67$, maka dari itu $df = n - k$ ($67 - 6 = 61$) maka didapat t_{tabel} sebesar 1,670.

Tabel 11. Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	Sig.	t_{tabel}	Keterangan
KSDM	2,036	0,046	1,670	H ₁ Diterima
GG	-0,043	0,966	1,670	H ₂ Tidak Diterima
AI	2,468	0,016	1,670	H ₃ Diterima
SIK	1,022	0,311	1,670	H ₄ Tidak Diterima
SAP	0,316	0,753	1,670	H ₅ Tidak Diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis satu (H1) menerangkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari uji t di dapati $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,036 > 1,670$) dan $p\text{ value} < \alpha$, yaitu $0,046 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H1 diterima.
2. Pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis dua (H2) menerangkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari uji t di dapati $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,043 < 1,670$) dan $p\text{ value} > \alpha$ yaitu $0,966 > 0,50$. Hasil tersebut meunjukkan bahwa variabel *good governance* tidak berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H2 tidak diterima.
3. Pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis tiga (H3) menerangkan bahwa variabel audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari uji t di dapati $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,468 > 1,670$) dan $p\text{ value} < \alpha$, yaitu $0,016 < 0,50$. Hasil tersebut meunjukkan bahwa variabel audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H3 diterima.
4. Pengaruh kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis empat (H4) menerangkan bahwa variabel kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji t di dapati t_{hitung}

$t < t$ tabel ($1,022 < 1,670$) dan p value $> \alpha$, yaitu $0,311 > 0,50$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_4 tidak diterima.

5. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis lima (H_5) menerangkan bahwa variabel penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji t di dapati t hitung $< t$ tabel ($0,316 < 1,670$) dan p value $< \alpha$, yaitu $0,753 > 0,50$. Hasil tersebut meunjukkan variabel penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_5 tidak diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, kualitas laporan keuangan akan semakin baik apabila di dukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Irafah & Nurmala Sari, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Mecling (1976) bahwa mekanisme *bonding cost* yang digunakan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent* telah berjalan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau mengisi jabatan bagian keuangan di BPKAD Karisidenan Kedu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Irafah & Sari (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualiat laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Amani (2018) dan Shinta *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujiam yang telah dilakukan menyatakan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Baik buruknya pemerintahan dapat di nilai ketika suatu pemerintahan bersinggungan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Hasil penelitian ini tidak menunjukkan kesesuaian dengan teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen & Mecling (1976) bahwa mekanisme *bonding cost* yang digunakan dapat meminimalisir adanya asimetri informasi belum berjalan dengan baik. Karena perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan aktual masyarakat yang disusun secara rasional dan rasional belum dikembangkan oleh pejabat pemerintah. Jadi, mekanisme *bonding cost* tidak dapat meminimalisir adanya asimetri informasi pada BPKAD Karisidenan Kedu.

Berdasarkan hipotesis yang diperoleh bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Shinta *et al.* (2020) Utomo *et al.* (2021) yang menyatakan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini konsisten dengan penelitian Ikhsan (2018) yang menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Audit Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, semakin baik peranan audit internal dalam pemerintahan maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh suatu pemerintah. Karena dengan adanya keterlibatan fungsi audit internal dalam proses pelaporan keuangan yang sudah diterapkan pada BPKAD Karisidenan Kedu mampu menghasilkan transparansi yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Mecling (1976) bahwa mekanisme *bonding cost* yang digunakan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent* telah berjalan. Peran audit internal yang telah diimplementasikan pada BPKAD Karisidenan Kedu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Irafah & Sari (2020) yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Atika *et al.*, (2019) yang menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menyatakan bahwa sistem informasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya ada atau tidaknya penerapan sistem informasi keuangan dalam proses

penyusunan laporan keuangan pada BPKAD Karisidenan Kedu tidak berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan BPKAD Karisidenan Kedu belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi SIKD untuk membantu mengelola keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak menunjukkan kesesuaian dengan teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen & Mecling (1976) bahwa mekanisme *bonding cost* yang digunakan dapat meminimalisir adanya asimetri informasi belum berjalan dengan baik. Karena pada Karisidenan Kedu hanya beberapa daerah yang telah menggunakan sistem informasi keuangan atau aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah).

Berdasarkan hipotesis yang diperoleh bahwa hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Irafah & Nurmala Sari (2020) yang menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Simanjuntak (2020) yang menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa baik atau tidaknya standar akuntansi pemerintah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BPKAD Karisidenan Kedu.

Hasil penelitian ini tidak menunjukkan kesesuaian dengan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Mecling (1976) bahwa mekanisme *monitoring cost* yang digunakan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya asimetri informasi belum berjalan dengan baik. Artinya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah tidak memungkinkan pengawasan atau pengendalian dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak menghasilkan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan panduan yang dijelaskan pada standar akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amani, (2018) dan Utomo *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahartini *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, audit internal, penerapan sistem informasi keuangan dan

penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karisidenan Kedu dengan jumlah sampel 67 responden. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, *good governance*, audit internal, penerapan sistem informasi keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan memberikan sumbangan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meskipun dalam pengujian menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

Hasil uji F menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang bagus atau (*fit*). Hasil uji t menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan *good governance*, penerapan sistem informasi keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, N. S. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit Dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)*. SKRIPSI, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Atika, D., Junaidi, L. D., & Irmadhani, A. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan. *Jurnal Warta*, 224, 1829–7463.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsan, M. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Skpd Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan. (2022). Semester I Tahun 2022. *Semester I Tahun 2022*.
- Irafah, S., & Nurmala Sari, E. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337–348. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.21775>
- Jensen, M. C. dan W. . M. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3.
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1125–1134.

Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005, (2005).

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).

PP RI Nomor 56 Tahun 2005. (n.d.). *PP RI Nomor 56 Tahun 2005*. Bpkp.Go.Id. <https://www.bpkp.go.id>

Saragi, A. (2018). *BPK Perwakilan Provinsi Jateng Serahkan LHP atas LKPD TA 2018 dari 26 Kabupaten/Kota*. Jateng.Bpk.Go.Id. <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/05/Penyerahan-LHP-26-Kabupaten-Kota-TA-2018-Press-Release.pdf>

Sari, G. I. (2016). *Pengaruh Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu)*.

Sari, N., Hasan, A., & Diyanto, V. (2016). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bu. Riau University*.

Sari, N. P. Y. M. M., Adiputra, I. M. P., SE, S. H., Si, M., & Edy Sujana, S. E. (2014). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).

Shinta, I., Sri, P., Sriyono, S., Veteran, U. ", & Yogyakarta, ". (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia*. *Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.

Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Uta*. *Jurnal Manajemen*, 1(2), 129–138.

Sukrisno, A. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.

Tomasoa, T. F., Meiman, H., & Audit, I. (2022). *Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon dan Provinsi Maluku Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Kota Ambon*. 2, 22–27.

Utomo, A. C., Suyanto, S., & Riyanto, K. B. (2021). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro)*. *Jurnal Akuntansi Aktiva*, 2(2), 145–152.

- Yudha, A., Purnomo, P., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Good Governance Dan E-Government Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12), 1–20.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56–64.